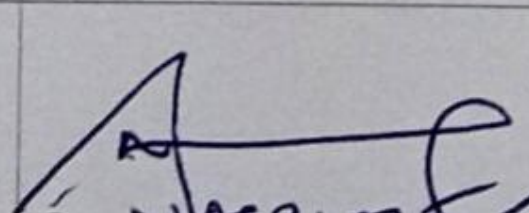
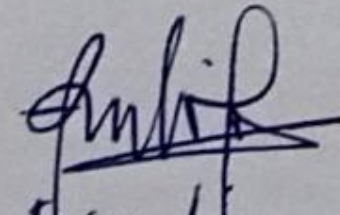


**KESEPAKATAN HASIL PEMBAHASAN  
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021**

1. Menyepakati substansi masing-masing Rencana Aksi terhadap sub rencana aksi (pada kolom 1), penanggungjawab sub rencana aksi (pada kolom 2), instansi terkait (pada kolom 3), kriteria keberhasilan (pada kolom 4), ukuran keberhasilan (pada kolom 5), ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12 (pada kolom 6) dan data dukung (pada kolom 8) pada Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana tercantum dalam lampiran kesepakatan ini.
2. Penanggungjawab sub rencana aksi (pada kolom 2) bertanggungjawab serta mendukung secara penuh pelaksanaan masing-masing Sub Rencana Aksi (pada kolom 1) serta masing-masing instansi terkait (pada kolom 3) akan secara maksimal memenuhi masing-masing ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12 (pada kolom 6) pada Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana tercantum dalam lampiran kesepakatan ini.
3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggungjawab secara penuh untuk memantau pelaksanaan masing-masing sub rencana aksi serta mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap data dukung masing-masing ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12 untuk kemudian disampaikan kepada Bappeda Kabupaten/Kota.
4. Bappeda Kabupaten/Kota selaku pemegang *username* dan *password* pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden bertanggungjawab untuk menyampaikan pelaporan pada masing-masing ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12 (pada kolom 6) sesuai dengan waktu pelaporan yang telah ditetapkan.

Padang, 29 Januari 2021

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT		PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI	
1. Inspektorat	1.....	 2. .... NASRIAH	1. Bapelitbang 1. .... PWI QVIYANTI, S-IP, M.Si
2. Bappeda			2. Inspektorat 2. .... Elvina Karhika
3. Bakeuda	3.....	 4. .... Ernalis	3. BADAN KEUANGAN 3. .... EGIE PRATAMA MULYA
4. Dinas PP dan PA			4. DP3APPKB 4. .... NIRZA SARITA S. Sidiq

Lampiran

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RANDA PUG) KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

RENCANA AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6	% CAPAIAN 7	DATA DUKUNG 8
<b>MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>							
<b>Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah</b>							
Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	<b>B03 :</b> Tersusunnya rancangan kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)  <b>B06:</b> 1. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) 2. Sosialisasi/Advokasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi  <b>B09:</b> Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota  <b>B12 :</b> -		<b>B03 :</b> Scan rancangan kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)  <b>B06:</b> 1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tandatangan Kepala Daerah dan Stempel Kepala Daerah. 2. Scan data dukung pelaksanaan Sosialisasi/Advokasi seperti surat atau kliping koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi)  <b>B09:</b> Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota  <b>B12 :</b> -
Penetapan rencana pencapaian PUG tahun 2021 yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB	Tersedianya tolak ukur pencapaian kinerja PUG Tahun 2021 sebagai pedoman	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian	<b>B03 :</b> 1. Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG		<b>B03 :</b> 1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang rencana pencapaian PUG (telah memuat

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
			pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota	PUG di tingkat Kabupaten/Kota	2. Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah		Nomor Keputusan, tanggal ditetapkan, tandatangan Kepala Daerah dan Stempel)
					B06:		B06:
					B09:		B09:
					B12:		B12:
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 atau Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota (hasil pilkada Than 2018) yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender (bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan Perubahan RPJMD)	Pemerintah Kota Bukittinggi	Bapelitbang	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen RPJMD/Perubahan RPJMD Kabupaten/Kota yang telah mengomodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03 : 1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan dokumen RPJMD 2. Orientasi tentang dokumen RPJMD. 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD		B03 : 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD 2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RPJMD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3. Scan agenda kerja tim penyusun RPJMD
					B06: Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD		B06: Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RPJMD
					B09: Penyusunan rancangan RPJMD, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis 4. Tercantumnya isu gender dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 5. Tercantumnya dengan jelas strategi dan arah kebijakan serta program		B09: 1. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang telah memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. Scan BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis yang telah mengakomodir permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah 4. Scan BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah memuat isu gender dalam tujuan dan sasaran pembangunan 5. Scan Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah yang telah mencantumkan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang mengakomodir isu gender

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					7. Tersedianya program terkait penanganan isu gender pada BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah 8. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Scan Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kota Bukittinggi	Bapelitbang	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	<b>B03 :</b> 1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD 2. Orientasi tentang RKPD. 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD  <b>B06:</b> Rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada		<b>B03 :</b> 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD 2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3. Scan agenda kerja tim penyusun RKPD 4. Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD  <b>B06:</b> 1. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 5. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender
					<b>B09:</b> Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5. Tersedianya indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		<b>B09:</b> 1. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 2. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum 3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 4. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 5. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 6. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender
					<b>B12 :</b>		<b>B12 :</b>

RENCANA AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6	% CAPAIAN 7	DATA DUKUNG 8
<b>PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG</b>							
<b>Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>							
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai stakeholder di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten/Kota	B03 : 1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B03 : 1. Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12 : -		B12 : -
Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh OPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit Kerja	Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota	B03: Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B03: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -

RENCANA AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6	% CAPAIAN 7	DATA DUKUNG 8
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota Tahun 2021	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, teratur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021	B03: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota Tahun 2021 B06: - B09: - B12: -		B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota Tahun 2021 yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG B06: - B09: - B12: -
<b>SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>							
<b>Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah</b>							
Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten/Kota	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB	Perangkat Daerah dan Instansi vertikal memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah dan Instansi vertikal 2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya	B03: Penyusunan konsep promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender B06: Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah dan Instansi vertikal B09: Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya B12: Penyusunan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota		B03: Scan konsep promosi dan advokasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya B12: Scan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota
<b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)</b>							
<b>Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah</b>							
Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten/Kota	B03: 1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan		B03: 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver

RENCANA AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6	% CAPAIAN 7	DATA DUKUNG 8
					Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota 3. Ditetapkannya Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota oleh Keputusan Kepala Daerah 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) 5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota  B06: - B09: - B12: -		PPRG Kabupaten/Kota (yang telah dikoreski oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi  B06: - B09: - B12: -
Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota tahun 2021	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten/Kota pada website daerah	B03: 1. Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya (2020) pada website Pemerintah Daerah 2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah 3. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota  B06: Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota B09: 1. Ditetapkannya buku profil gender kab/kota dengan keputusan Kepala		B03: 1. Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak 3. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota  B06: Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul B09: 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang buku profil gender kab/kota dengan sebagai



RENCANA AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6	% CAPAIAN 7	DATA DUKUNG 8
					Daerah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten/Kota		acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten/Kota (lengkap) 3. Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak (tampak depan/cover)
					<b>B12:</b> Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah		<b>B12:</b> Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada website pemerintah daerah	<b>B03:</b> 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 pada sub kegiatan yang terkait dengan : a. mengatasi kesenjangan gender yang terjadi b. penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDG's c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat ( <i>service delivery</i> ) d. Dalam rangka pencapaian SPM e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. f. inovasi Daerah		<b>B03:</b> 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Barat antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan yang mengatasi kesenjangan gender yang terjadi 3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan yang merupakan penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs 4. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat ( <i>service delivery</i> ) 5. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM 6. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. 7. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah

RENCANA AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6	% CAPAIAN 7	DATA DUKUNG 8
					<b>B06:</b> 1. Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 pada website resmi pemerintah daerah		<b>B06:</b> 1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG) 2. Scan dokumen Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) pada Rencana Sub Kegiatan OPD Kabupaten/Kota 3. Scan link Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah
					<b>B09:</b> 1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah 2. Rekapitulasi Sub Kegiatan yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota		<b>B09:</b> 1. Scan dokumen seluruh Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS 2. Scan Rekapitulasi Sub Kegiatan yang telah responsif gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
					<b>B12:</b> 1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. Terinventarisasinya sub Kegiatan Perangkat Daerah yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Ketua Pokja PUG		<b>B12:</b> 1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. Scan Rekapitulasi sub kegiatan Perangkat Daerah yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 3. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangani oleh Ketua Pokja PUG

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG</b>							
<b>Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran</b>							
Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kota Bukittinggi	Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota	<b>B03:</b> 1. Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2021 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2020. 2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan Januari – Maret 2021		<b>B03:</b> 1. Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021. 2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan Januari – Maret 2021.
					<b>B06:</b> Pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan April – Juni 2021		<b>B06:</b> Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan April – Juni 2021
					<b>B09:</b> 1. Pembentukan Tim Review PPRG 2. Review PPRG Tahun Anggaran 2022 3. Pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan Juli – September 2021		<b>B09:</b> 1. Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten/Kota 2. Scan hasil Review PPRG pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan Juli – September 2021
					<b>B12:</b> Pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan Oktober – Desember 2021		<b>B12:</b> Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan Oktober – Desember 2021